

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Gowa

Nur Muliasari ¹⁾ Nuryanti Mustari ²⁾

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90221

¹⁾muliasarimsnur@gmail.com ²⁾nuryantimustari@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Penyebaran Covid-19 mewajibkan setiap pemerintah kabupaten untuk menyiapkan strategi kebijakan yang baik. Perbedaan kesiapan setiap daerah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 menyebabkan kebijakan harus sesuai dengan kapasitas daerah. Kebijakan keseragaman Penanggulangan Covid-19 menyebabkan pemerintah Kabupaten Gowa melakukan penyesuaian kebijakan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan literatur-literatur yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah kabupaten gowa dalam rangka pencegahan covid 19 di daerah gowa telah menunjukkan hasil yang baik dalam hal disposisi dan sumber daya. Namun pada implementasinya, Indikator komunikasi dan Fragmentasi kebijakan masih lemah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Covid-19, Kabupaten Gowa

Abstract

The spread of Covid-19 requires every district government to prepare a good policy strategy. The difference in the readiness of each region in preventing the spread of the COVID-19 virus causes policies to be in accordance with regional capacities. The uniform policy of handling Covid-19 has caused the Gowa Regency government to make policy adjustments with the Provincial Government and the Central Government. This study uses a qualitative study approach using secondary data and related literature. The results showed that the Gowa Regency government's policies in the context of preventing covid 19 in the Gowa area had shown good results in terms of disposition and resources. But in its implementation; Communication indicators and policy fragmentation are still weak.

Keywords: Policy Implementation, Covid-19, Gowa Regency

A.LATAR BELAKANG

Virus SARS-CoV-2 menjadi *endemic* menyebar ke seluruh Negara sehingga diperlukan kesiapan dalam penanggulannya. Kasus awal ditemukan di Kota Wuhan, China di bulan Desember

Tahun 2019. *World Health Organization* (WHO) mengumumkan virus Corona menjadi Pandemi global yang dapat bertransmisi ke seluruh Negara. Dan telah dilaporkan kasus terkonfirmasi terinfeksi virus corona di sejumlah Negara. Di

Indonesia, Presiden Jokowi mengumumkan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Jandrić, 2020; Satya, 2020). Kemudian di Minggu, 15 Maret, Pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan *social distancing*. Dengan menghindari keramaian dan menjaga jarak 1,5 meter pada di semua tempat. Kebijakan untuk melakukan *social distancing* diterapkan di berbagai kegiatan *Work From Home* (WFH), Pembelajaran Daring, dan beribadah di rumah. Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat No.Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (Covid-19) sesuai instruksi Presiden untuk menerapkan *social distancing* (Purnamasari & Raharyani, 2020).

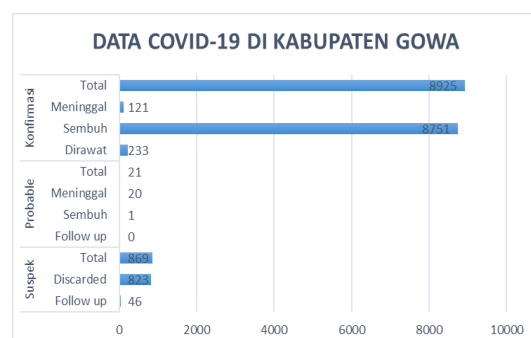
Berdasarkan instruksi ini semua kepala daerah di Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mencegah transmisi virus corona berkembang di daerahnya. Kabupaten Gowa menjadi penyumbang kasus transmisi virus corona di Indonesia dikarenakan pelaksanaan kegiatan *ijtima* ulama. *Ijtima* Ulama Zona Asia dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertemuan Ulama Islam di Asia ini diikuti oleh 8000 ulama Asia yang menimbulkan transmisi virus penyebaran yang baru. Ketidakpatuhan Panitia Pelaksana terkait pengabaian Peraturan Pencegahan Covid—19 di Kabupaten Gowa menimbulkan miskomunikasi dan peserta yang telah berada di tempat pelaksanaan. Namun, Pemerintah kabupaten Gowa telah melaksanakan koordinasi dan negosiasi. Pada Tanggal 19 Maret 2020 kegiatan *Ijtima* Ulama Dunia 2020

dibatalkan dan dilakukan isolasi serta dipulangkan ke daerah masing-masing. Namun, transmisi Covid-19 *Ijtima* Ulama telah menyebar di Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Firdayanti et al., 2020).

Sedangkan kasus pertama di Kabupaten Gowa dilaporkan dua orang yang teridentifikasi positif merupakan warga Kecamatan Somba Opu, terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa pada 31 Maret 2020. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa per hari Rabu, 20 Januari 2021, terdapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 856 orang, sembuh 1.882 orang dan meninggal dunia sebanyak 8 orang. Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan memahami Kabupaten Gowa menjadi wilayah dengan jumlah dan kasus kematian covid maka harus dilakukan PSBB dan perlu persetujuan Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto (Nur, 2020).

Sesuai data yang terlampir dari Sulsel tanggap covid-19 juga dapat terlihat kasus harian dan kumulatif kasus harian dari setiap kota dan kabupaten yang berada di Sulawesi selatan. Data covid-19 yang terdapat di gowa adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Covid-19 Dikabupaten Gowa



Sumber Covid19.Sulsel Prov

Penyebaran yang begitu cepat dari virus tersebut tentunya memiliki dampak dari berbagai aspek dimulai dari pendidikan sampai aspek ekonomi yang membuat pemerintah harus membuat kebijakan yang efektif untuk mencegah dampak yang terjadi saat pandemi berlangsung.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases* mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 48 tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan virus corona yang ada di wilayah Kabupaten Gowa. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut dari Pemerintah Pusat komando nasional (Ramlah, 2020). Ditengah pandemic kebijakan pemerintah daerah di sejumlah daerah menjadi cerminan dari pola koordinasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi virus corona ini. Pengambilan keputusan tentang *lockdown* di Tegal menjadi salah satu polemic karena menetapkan jalur transportasi utama antar provinsi dalam pembatasan karantina wilayah. Pemerintah setempat dinilai menghiraukan dampak ekonomi dari kebijakan ini. Pemerintah memang bermaksud untuk melindungi masyarakat tegal dalam menghentikan transmisi virus corona dengan menerapkan *social distancing* (Dodds et al., 2020; Listina et al., 2020; Toxvaerd, 2020). Terdapat banyak artikel sebelumnya yang membahas tentang kebijakan pemerintah daerah dalam menghadapi Covid-19 (Pratiwi, 2021; Ristyawati, 2020; Yunus & Rezki, 2020). Akan tetapi banyak yang tidak berfokus pada perubahan kebijakan

terkhusus untuk pemerintah kabupaten. Adapun, artikel ini akan mencoba untuk menjawab hal tersebut.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk membentuk suatu cara baru yang strategis serta efektif untuk mengatasi keadaan yang sedang terjadi. Perlunya ada target kebijakan dari kebijakan yang akan diimplementasi serta prosedur yang jelas dan dapat ditanggung jawabkan secara metodologi dan mencegah apa yang perlu dicegah dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Proses ini menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternative kepuasan yang terencana, sistematis dan terarah demi menghasilkan program dan identifikasi masalah yang berkualitas (Mustari, 2013).

B.LANDASAN TEORITIS

Melati (2020) Empat variabel untuk menganalisis implementasi kebijakan: Struktur, Disposisi atau Sikap dan Komunikasi serta Sumberdaya. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan instruksi atau kebijakan dipahami dengan jelas oleh orang yang akan melaksanakan perintah (sesuai, jelas, akurat dan konsisten). Sumber daya juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaksana mampu menerapkan kebijakan yang efektif. Disposisi atau sikap diartikan sebagai komitmen pelaksana untuk mematuhi kebijakan. Terakhir, struktur birokrasi juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam dua unsur birokrasi administrasi, pedoman yang berisi instruksi tertulis untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi dan proses administrasi; fragmentasi – upaya untuk membagi tanggung jawab suatu kebijakan menjadi

beberapa unit kerja jika disimpulkan untuk meningkatkan layanan.

Pendekatan Edwards adalah yang paling relevan untuk tujuan penelitian ini, mengingat penekanannya pada menilai implementasi kebijakan dalam hal penanganan Pemerintah Kabupaten terhadap pandemi COVID-19. Dengan pendekatan komprehensif, termasuk mempertimbangkan instrumen lain seperti sumber daya dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, kerangka kerja Implementasi kebijakan Edwards sangat relevan untuk menilai implementasi pemerintah kabupaten Gowa. Paper ini akan membahas tentang pemerintah kabupaten Gowa yang telah membuat keputusan untuk melindungi masyarakat dari Covid-19. Penulis akan memberikan deskripsi tentang Analisis implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Gowa dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19.

C.METODE

Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif menggunakan teori dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa. Kemudian, metode penelitian ini menggunakan data-data sekunder dengan menggunakan literatur-literatur untuk mengidentifikasi kebijakan, fenomena-fenomena yang terjadi, dan dampaknya. Dimana fokus penelitian ini akan menitik beratkan kepada penilaian analisis kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten gowa dalam penanggulangan penyebaran covid-19.

D.HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Sejak awal januari 2020 pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan himbauan kepada masyarakat di Gowa melalui media tentang mencegah penularan virus Corona. Namun

pemberitahuan ini hanya bersifat pengenalan singkat tentang Gejala langkah pencegahan dan cara perjalanan di tengah pandemi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dr Hasanuddin, Selasa mengatakan dua orang yang teridentifikasi positif merupakan warga Kecamatan Somba Opu, terdiri atas laki-laki dan perempuan dewasa. Hal itu pertama kali dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pasien yang berdomisili di Gowa yang terinfeksi virus corona. Hasanuddin menyebutkan terdapat dua pasien positif ini untuk sementara dirawat di ruang isolasi salah satu rumah sakit rujukan di Makassar Selain bertambahnya kasus positif, seorang warga Gowa dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) meninggal dunia di rumah sakit. Yang bersangkutan belum dinyatakan positif COVID-19 karena hasil *swab*-nya belum keluar. satu warga Somba Opu, pria berusia 56 tahun meninggal di rumah sakit. Dilaporkan masuk ke rumah sakit per 23 Maret dengan keluhan demam dan sesak napas.

Di Tengah kepanikan masyarakat akan virus corona kegiatan ijtima ulama zona asia yang akan di tengah dilaksanakan pada tanggal 19-22 maret 2020. Kegiatan tersebut diikuti oleh ulama dari berbagai daerah bahkan di luar Indonesia (Internasional). Sebagian peserta telah berada di gowa ketika surat edaran Bupati Gowa tentang himbauan untuk mempertimbangkan menunda segala kegiatan/even baik *indoor* maupun *outdoor* yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Organisasi Masyarakat/swasta dengan melibatkan orang banyak sampai batas waktu kondusif.

Masyarakat khawatir karena panitia kegiatan tersebut masih melakukan aktivitas sebelum surat edaran ini

dikeluarkan. Hal tersebut terbukti ketika laporan virus sudah menyebar di antara peserta yang menjadikan klaster Gowa di beberapa daerah di Indonesia seperti Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data pantauan pertama Covid-19 di Kabupaten Gowa setelah pada tanggal 23 Maret 2020 terdapat dua pasien terinfeksi positif, kemudian per 25 Maret 2020 Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 8 orang. Pada 26 Maret 2020 meningkat jumlah ODP sebanyak 12 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP): 9 orang dengan 5 orang dirawat dan 4 orang sehat. Dan jumlah pasien positif sebanyak 3 orang. Kemudian di hari selanjutnya jumlah kasus positif sebanyak 5 orang. Tanggal 28 tidak terdapat peningkatan kasus positif namun di hari selanjutnya bertambah 1 pasien positif. Di Hari selanjutnya 30 Maret 2020 positif bertambah 2 orang. Penyebaran virus corona atau Covid-19 di wilayah Kabupaten Gowa semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Media Center Covid-19 Kabupaten Gowa hingga Jumat 17 April 2020, tercatat pasien positif sebanyak 23 orang dari sebelumnya 22 orang. Kemudian Orang dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 285 orang dari sebelumnya 280 orang dan Pasien dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 124 orang dari sebelumnya 116 orang. Sabtu, (18/4/2020). Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo mengatakan, pihaknya telah menyiapkan proposal rencana penerapan PSBB untuk diajukan ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dikaji.

Hal tersebut melihat perkembangan khususnya kasus Covid-19 di tiga kecamatan yang merupakan epicentrum penyebaran yakni Kecamatan

Somba Opu, Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Barombong. Pemerintah kabupaten Gowa berharap bisa sejalan dengan Kota Makassar dalam hal menerapkan PSBB. Kerjasama yang kuat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat. Langkah penerapan PSBB pun harus ditempuh karena banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah untuk berada di rumah. Hal tersebut dikarenakan 45 persen masyarakat di Gowa bekerja di Makassar kemudian 80 persen segala kegiatan pasien positif Covid-19 berada di Makassar. Dengan diterapkannya PSBB, masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah untuk berada di rumah diberi sanksi. Untuk memaksimalkan penerapan PSBB di wilayah Kabupaten Gowa, terlebih dulu dilakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat.

Penerapan PSBB kemudian disetujui Menteri Kesehatan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/273/2020. Hal ini berjalan sukses dengan capaian penurunan kasus positif pada setelah pelaksanaan PSBB Gowa mulai diberlakukan pada 4 Mei lalu dan akan berakhir pada 17 Mei besok. Adnan menyebut, tidak dilanjutkannya PSBB tahap dua karena mempertimbangkan faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal menurut Adnan, jika PSBB diberlakukan hal itu tidak lagi relevan dengan kebijakan yang baru-baru ini ditetapkan pemerintah pusat.

Misalnya saja, kebijakan yang melonggarkan aktivitas untuk beberapa sektor. Seperti pembukaan akses moda transportasi, pembukaan sejumlah perkantoran, dan beberapa kelonggaran

lainnya. Adnan menilai, PSBB tidak akan efektif lagi diterapkan. Namun, bukan berarti Pemerintah Kabupaten Gowa lepas tangan dalam upaya penanganan Covid-19.

"Ini bukan berarti kita membuka keran untuk penyebaran virus. Jangan menganggap setelah PSBB semua sudah bebas dilakukan. Tapi kita berharap dari sini masyarakat bisa lebih disiplin dan ikut imbauan pemerintah. Karena peningkatan juga semakin tinggi," terang Adnan.

Pemerintah Kabupaten Gowa juga masih akan tetap menyiagakan posko di sejumlah perbatasan. Termasuk tetap aktif melakukan patroli gabungan. Hanya saja, tidak akan ketat seperti saat PSBB diterapkan. Patroli gabungan juga bersifat lebih edukatif kepada masyarakat.

Selain itu, Pemkab Gowa juga akan lebih gencar melakukan rapid test massal. Adnan mengatakan, sejak penerapan PSBB, Pemkab Gowa telah melakukan rapid test terhadap lebih dari 10.000 orang. Rapid test ini diprioritaskan pada orang-orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif sebelumnya, daerah-daerah yang masuk zona merah, dan orang yang akan masuk ke Kabupaten Gowa. Ketua DPRD Gowa, Rafiuddin menyatakan mendukung keputusan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk tidak melanjutkan PSB tahap dua. Menurut Rafiuddin, rapid test massal sudah tepat dilakukan, hal itu setidaknya bisa lebih mudah mendeteksi masyarakat yang terpapar virus Corona.

Dalam analisis indikator pertama komunikasi. Implementasi yang efektif adalah tanggungjawab keputusan yang apa yang harus dilakukan. Pembuat kebijakan harus mengetahui dengan jelas dampak di setiap kebijakan di masyarakat. Dalam pemerintah Kabupaten Gowa dapat ditemukan dalam hal kebijakan ditemukan

koordinasi mengenai covid-19 dengan gubernur Sulawesi Selatan dan walikota Makassar yang lemah. Pembuat kebijakan di setiap daerah harus memaksimalkan perannya untuk memutus rantai transmisi virus. Hasil dari ketidakefektifan komunikasi, sebagai contoh dapat dilihat dari perbedaan waktu dalam penetapan PSBB. Karena pemerintah Kota Makassar telah menetapkan untuk melonggarkan aktivitas seperti membuka Mall, bandara dan perkantoran. Kebijakan tersebut harus dilakukan perubahan dengan pertimbangan yang matang dengan koordinasi yang baik.

Indikator kedua untuk menganalisis implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut Sarjono dan Sulistiadi (2018), sumber daya dibedakan menjadi empat elemen yaitu sumber daya manusia, modal, fasilitas, instrument kebijakan. Dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki tenaga ahli di setiap bidangnya. Satgas Covid-19 Kabupaten Gowa dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Polisi, TNI, BNPB Kabupaten Gowa. Anggaran dana untuk penanganan Covid-19 Rp. 500 Juta dan karena kebijakan wajib masker yang mendapat penghargaan satu juta masker yang bersumber dari Dana Insentif Daerah Pemerintah Pusat sebesar Rp. 12,3 Triliun. Fasilitas yang mendukung upaya pencegahan dan pemeriksaan Covid-19 tentunya 24 Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf untuk perawatan pasien terinfeksi. Terakhir instrumen kebijakan, pemerintah kabupaten gowa telah mengeluarkan Instruksi, surat edaran, serta imbauan. Keempat hal ini dapat dilihat bahwa Kabupaten Gowa dapat melakukan penanganan terhadap Covid-19.

Indikator ketiga adalah disposisi atau sikap. Pemerintah kabupaten dalam hal keseriusan untuk mencegah *cluster* baru di daerah kabupaten Gowa pada saat pelaksanaan PSBB melakukan *rapid test* massal kepada lebih 10.000 masyarakat yang masuk dalam zona merah serta gerakan satu juta masker. Kemudian Indikator keempat adalah struktur birokrasi yang terbagi menjadi dua aspek pertama Standart operational Procedure (SOP) dan peningkatan pelayanan (Cory et al, 2019; Krisnajaya et al, 2019). Satgas Covid Kabupaten Gowa telah melakukan SOP yang sesuai dengan standar nasional. Mulai dari penanganan pasien sampai pada penguburan. Dalam konteks kebijakan fragmentasi kebijakan, pemerintah kabupaten gowa masih membutuhkan pengembangan di berbagai lembaga. Keseragaman tindakan harus dilakukan oleh setiap lembaga sampai ke desa maupun rt/rw. Karena pemerintah kabupaten harus bekerja bersama-sama baik masyarakat serta birokrasi yang lainnya dalam menghentikan penyebaran virus Covid.

E.KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Upaya pembuatan kebijakan pemerintah kabupaten gowa dalam rangka pencegahan covid 19 di daerah gowa telah menunjukkan hasil yang baik dalam hal disposisi dan sumber daya. Dalam implementasi dari Indikator komunikasi dalam melakukan koordinasi dengan beberapa pihak mengenai kebijakan dalam pengentasan penyebaran tergolong lemah.

Ditilik dalam sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan secara efektif dan sesuai tinjauan kebijakan saat diimplementasikan, sumber daya pemerintah kabupaten Gowa memadai; terdapat tenaga ahli di setiap

bidang turut membantu dalam mengentaskan pandemi yang ada di kabupaten gowa. Baik dalam disposisi sikap pun dalam konteks kebijakan fragmentasi kebijakan, pemerintah kabupaten gowa masih membutuhkan pengembangan di berbagai lembaga.

2. Rekomendasi

Menurut hasil dari kesimpulan diatas, maka rekomendasi dari penelitian ini adalah:

1. Keseragaman tindakan harus dilakukan oleh setiap lembaga sampai ke desa maupun rt/rw. Keseragaman tindakan yang harus sesuai dengan pemerintah pusat menjadi hambatan dalam alur kebijakan pemerintah kabupaten gowa. Dengan memahami dan menerapkan kebijakan di semua struktur birokrasi maka pemerintah kabupaten gowa dapat menghentikan kasus Covid-19.
2. Pemerintah kabupaten gowa dapat melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pengembangan kebijakan Covid-19. Kemudian kebijakan implementasi PSBB yang harus dilakukan bersama-sam bahkan di setiap tingkatan daerah. Hal tersebut dikarenakan untuk memaksimalkan pemutusan mata rantai covid-19.
3. Sistem kesehatan yang harus ditingkatkan yaitu pencegahan, dan sosialisasi kepada masyarakat yang konsisten.

REFERENSI

Dodds, K., Broto, V. C., Detterbeck, K., Jones, M., Mamadouh, V., Ramutsindela, M., Varsanyi, M., Wachsmuth, D., & Woon, C. Y. (2020). *The COVID-19 pandemic: territorial, political and governance dimensions of the*

- crisis*. Taylor & Francis.
- Firdayanti, F., Mumthi'ah Al Kautzar, A., Taherong, F., Andryan, Z. Y., & Diarfah, A. D. (2020). Pencegahan Covid-19 Melalui Pembagian Masker Di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa. *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, 2(1), 53–57.
- Jandrić, P. (2020). Postdigital research in the time of Covid-19. *Postdigital Science and Education*, 1.
- Listina, O., Solikhati, D. I. K., & Fatmah, I. S. (2020). Edukasi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. *JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia*, 1(2), 10.
- Melati, H. B. (2020). Regulation Implementation Effectiveness of Outdoors Users in Town Square of Bandung, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 108–121. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.7>
- Mustari, N. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik : Pemahaman Teoritis, Empiris*. Membumi Publishing.
- Nur, E. (2020). Analisis bentuk komunikasi masyarakat dalam menyampaikan informasi social distancing terhadap penanggulangan virus corona di Kabupaten Gowa. *Pangadereng*, 6(1), 109–118.
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52.
- Purnamasari, I., & Raharyani, A. E. (2020). Tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat Kabupaten Wonosobo tentang Covid-19. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(1), 33–42.
- Ramlah, R. (2020). Kontribusi Partai Politik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. *Vox Populi*, 3(1), 53–59.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249.
- Satya, P. A. N. I. P. (2020). COVID-19 dan potensi konflik sosial. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39–45.
- Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(1), 59–70.
- Toxvaerd, F. M. O. (2020). *Equilibrium social distancing*.
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.